

## FENOMENA DISHARMONISASI PARTAI POLITIK BERBASIS ISLAM PADA PEMILU 2019

**Baitur Rohman, M. Syahri, Nurul Zuriah**  
FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia.  
Email: Baiturrohman7@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) Karakter partai Islam dalam menghadapi pemilu 2019 di Kota Malang, (2) Penyebab disharmonisasi partai Islam saat pemilu 2019 di Kota Malang, dan (3) Solusi mengatasi disharmonisasi partai Islam saat pemilu 2019 di Kota Malang. Fokus penelitian ini adalah permasalahan disharmonisasi partai Islam saat pemilu 2019 di kota Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di kantor PPP kota Malang, PKS kota Malang, PAN kota Malang, dan PKB kota Malang. Prosedur penelitian terdiri dari tahapan pra penelitian, pelaksanaan, dan analisis data. analisis data meliputi empat tahapan, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. keabsahan data menggunakan empat tahapan yakni, *Credibility, Dependability, Confirmability, dan Transferability*. Hasil penelitian yakni, (1) Kordinasi internal partai sangat berpengaruh terhadap kinerja partai di Masyarakat. (2) dua Faktor disharmonisasi. *Internal*, adanya ketidaksesuaian langkah politik yang dilakukan patron partai dengan ideologis partai. *Eksternal*, adanya peran media yang kurang kredibel dalam menyampaikan informasi. (3) Solusi disharmonisasi, harus ada kordinasi internal yang bagus dan peran aktif setiap kader dalam menanggapi isu yang sedang beredar di media atau dimasyarakat. Kesimpulan, meliputi, (1) Karakter partai harus sesuai karakter Masyarakat, (2) media merupakan salah satu faktor disharmonisasi, (3) disharmonisasi bisa teratasi dengan silaturahmi

**Kata Kunci:** Disharmonisasi; Partai Politik Islam

### ABSTRACT

This study aims to describe (1) the character of Islamic parties in dealing with the 2019 general election in Malang, (2) the factors causing disharmony problems in dealing with the 2019 elections in Malang, and (3) Solutions to overcome the disharmony problems Islamic parties in dealing with the 2019 elections in Malang. The focus of this research is the problem of disharmony between Islamic parties in dealing with the 2019 elections in Malang. This research uses qualitative research with a descriptive approach. The research was conducted at the DPC PPP office in Malang, PKS in Malang, PAN in Malang, and PKB in Malang. The research procedure consisted of pre-research, implementation, and data analysis stages. Technical analysis of the data includes four stages, namely, data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data validity technique uses four stages, namely, *Credibility, Dependability, Confirmability, and Transferability*. The results showed that (1) internal party coordination is very influential on the performance of a party's character in society. (2) Factors for the problem of disharmony in Islamic parties in the city of Malang include internal factors, namely the incompatibility of political steps taken by party management with party ideology. External factors, namely the role of the media that is less credible in conveying information. (3) The solution to overcome disharmony problems is that there must be good internal coordination and active role of each cadre in responding to issues that are currently circulating in the media or in the community.

**Keywords:** Disharmonization; Islamic Political Parties

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah Negara modern dimana dalam menentukan pemerintahannya menggunakan sistem partai sama dengan negara-negara modern lainnya. Setiap warga Negara mempunyai hak untuk mendirikan partai politik, hal ini dikarenakan secara yuridis telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara menjamin kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, termasuk mendirikan partai yang berbasis Islam.

Islam dan politik merupakan dua hal yang sudah lumrah dan menjadi perdebatan. Partai-partai politik Islam diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar. Pertama, partai yang menjadikan Islam sebagai asas dan program formal. Kedua, partai yang mementingkan pengembangan nilai-nilai Islam dari pada simbol-simbol Islam. Islam dan politik tidak bisa dipisahkan, karena Islam tanpa politik akan melahirkan terbelenggunya kaum muslimin yang tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan dalam melaksanakan syariat Islam. Permasalahan sebaliknya yakni ketika politik tanpa Islam, hanya akan melahirkan masyarakat yang mengagungkan kekuasaan, jabatan, materi dan duniawi saja (Ridwan, 2017)

Partai Islam dalam sudut pandang sosiologis yang disebutkan dalam teori Geertz (dalam Tago, 2013) yang membagi masyarakat Islam ke dalam tiga golongan, yaitu (1) santri, (2) abangan dan (3) priayi, Secara umum golongan abangan dan priayi yang diidentifikasi sebagai muslim yang kurang taat kerap diasosiasikan sebagai basis partai nasionalis. Sebaliknya golongan santri yang merupakan penganut Islam taat diasosiasikan sebagai basis partai berideologi Islam. Partai Politik Islam dalam sejarahnya sering menuai dinamika perpolitikan, seperti tidak selarasnya antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Fenomena ini bisa dilihat dari penelitian

yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Fajri (2018) yang mengangkat judul tentang “Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam” dengan studi kasus warga Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Penelitian tersebut meminta sebanyak 85 responden untuk mengisi sampel tentang kepercayaan masyarakat terhadap partai Islam. Sebanyak 31% responden memberikan penilaian biasa saja terhadap partai Islam, adapun alasan yang disampaikan responden karena partai Islam tidak ada bedanya dengan partai nasional, dikarenakan masih saja ada partai Islam yang terlibat kasus yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam seperti kasus Korupsi. Responden yang lain sebanyak 15% memilih memberikan nilai negatif pada partai Islam dengan alasan yang hampir sama yakni banyak anggota partai Islam yang terlibat Korupsi. Pasang surut dalam dinamika perpolitikan Indonesia khususnya yang terjadi pada partai politik berbasis Islam dari masa ke masa, semakin menunjukkan beragamnya pemahaman Islam terhadap politik, dimulai dari munculnya partai-partai politik berbasis Islam pada era reformasi sebagai gerbong menuju kekuasaan sampai yang terbaru terbitnya Ijtimak ulama II merekomendasikan ketua umum partai Gerindra untuk menjadi calon presiden dalam pemilihan presiden 2019 dan ketua majelis Syuro partai PKS sebagai calon wakil presiden. Munculnya Ijtimak II ini menimbulkan pandangan yang berbeda diantara partai-partai Islam. Respon dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berpendapat bahwa Ijtimak Ulama II hanya sebuah klaim sepihak saja. Partai Islam lainnya yakni Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan Ijtimak Ulama itu perlu karena pada dasarnya Ijtimak Ulama akan menghadirkan dukungan ulama dan tentunya dukungan ulama ini sangat penting.

Permasalahan yang disebutkan di atas dikhawatirkan menghadirkan politik

identitas pada pemilihan umum 2019, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) dengan judul “Kebangkitan Politik Identitas Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta” dengan mengangkat permasalahan Pemilihan Gubernur Jakarta, dalam penelitian tersebut dikatakan kebangkitan politik identitas Islam digunakan dengan melalui upaya pembangunan citra diri sebagai sesama Muslim harus memilih pemimpin yang seagama dan seiman. Politik identitas yang muncul dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2017 akan mengancam demokrasi Indonesia. Termasuk, sedikit banyak membawa pengaruh dalam pemilu 2019. Permasalahan yang terjadi pada pemilihan Gubernur Jakarta akan menghadirkan Polarisasi yang nantinya akan menghadirkan dua identitas golongan. Golongan pertama akan membawa sentimen tentang agama dan golongan kedua akan membawa sentimen tentang Nasionalisme.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan karakter partai serta mengkaji permasalahan disharmonisasi beserta solusi pada pemilu 2019 di kota Malang. Berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang relevan. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh, Sari dengan judul “Kebangkitan Politik Identitas Islam pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta”. Penelitian ini membahas isu tentang politik identitas yang terjadi dalam pemilihan gubernur Jakarta.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menekankan pada aspek fenomena yang terjadi tentang hubungan disharmonis partai berbasis Islam dalam pemilihan umum 2019. Penelitian yang relevan di atas yang dijadikan sebagai subyek penelitian adalah masyarakat sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan menitikberatkan kepada partai politik sebagai subjek penelitian yang utama.

Fenomena merupakan tampilan objek peristiwa dalam persepsi yang tampil dalam suatu kesadaran dan bisa disaksikan dengan panca indera serta dapat dinilai dan diterangkan secara ilmiah (Hasbiansyah, 2005). Disharmonisasi adalah kondisi retaknya suatu peran sosial dalam suatu kelompok (Nasaruddin & Bahtiar, 2018)

Fenomena Disharmonisasi jika dilihat dari pengertian di atas adalah suatu fakta tentang kondisi dalam suatu kelompok yang tidak selaras dan menimbulkan keretakan atau perpecahan, sedangkan partai politik adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki persamaan kehendak, cita-cita dan ideologi tertentu dan berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan kebijakan dan program-program yang mereka telah buat (Sulaeman, 2015). Keberadaan partai politik akan membuat masyarakat merasa andil dalam menjalankan sistem pemerintahan (Prasetya, 2011)

Secara umum pemilu lahir dari konsepsi dan gagasan besar dari sebuah Demokrasi yang berarti merujuk kepada keterjaminan setiap warga dalam memilih pemimpinnya secara langsung dan terbuka (Bachtir, 2014). Hasil pemilu yang diselenggarakan secara keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat, dianggap mencerminkan masyarakat dalam menentukan kekuasaan. Pemilu diadakan dengan harapan dapat menghasilkan para wakil rakyat yang mampu membela kepentingan rakyat lewat setiap kebijakan (Sarbanini, 2015)

Berdasarkan sedikit penjabaran istilah di atas dapat diartikan jika fenomena disharmonisasi partai politik Islam adalah ketidakselarasan partai-partai politik Islam dalam menghadapi pemilu 2019 di kota Malang.

## METODE

Permasalahan dalam penelitian ini merupakan permasalahan suatu fenomena yang terjadi pada lingkungan sosial, maka dengan alasan di atas pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan dalam proses penelitian yang berhubungan dengan suatu fenomena sosial atau masalah manusia.

Subjek penelitian dalam penelitian ini melibatkan empat partai Islam di kota Malang yakni (1) PPP (2) PKS (3) PAN (4) PKB. Subjek penelitian merupakan sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti (Masruri, Kuntoro, & Arikunto, 2016).

Pengumpulan informasi ini dilakukan dengan cara mendatangi masing-masing kantor partai yang menjadi subjek penelitian dan melakukan wawancara. Wawancara adalah situasi berhadapan antara pewawancara dan responden yang bertujuan untuk menggali informasi yang diharapkan (Hakim, 2013).

Pendekatan kualitatif menjadikan teori sebagai pradigma yang akan menjadi landasan dari suatu penelitian (Rahmat, 2009). Pendekatan kualitatif menghasilkan data langsung dari orang-orang yang diamati. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau pihak-pihak yang bersangkutan. Peneliti merupakan instrumen kunci dalam pendekatan kualitatif yang harus mempunyai wawasan luas, karena nantinya peneliti akan bertemu langsung dengan pihak yang diamati untuk memberikan pertanyaan, kemudian menganalisis data dengan jelas (Mulyadi, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas untuk menghasilkan data yang akurat dan relevan peneliti menerapkan

beberapa teknik yakni *Pertama, Credibility* atau dapat dipercaya, *Kedua, Dependability* atau sudah sesuai dengan yang diharapkan, *Ketiga, Confirmability* atau harus menghasilkan temuan; dan *Keempat, Transferability, Transferability* bisa juga di sebut generalisasi dalam penelitian kualitatif (Afiyanti, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik partai politik berbasis Islam pada pemilu 2019 di Kota Malang

Karakteristik Partai yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini merupakan suatu gambaran bagaimana partai-partai Islam dalam menghadapi pemilihan umum pada 2019 di Kota Malang seperti, bagaimana strategi kemenangan, cara bersosialisasi dan bagaimana menghadapi permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian berikut karakter partai politik Islam pada pemilu 2019 Kota Malang.

#### a. Partai PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan salah satu partai politik yang berideologi Islam, jika dilihat dari pandangan ideologis partai, maka bisa disimpulkan karakter partai PPP dalam menghadapi pemilu 2019 lebih condong ke arah agamis. Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa partai PPP sering melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal agamis untuk bersosialisasi dengan masyarakat, seperti mengadakan sosialisasi ke pondok pesantren, mengangkat tokoh agama sebagai pengurus dan kegiatan yang lain. langkah PPP dalam menghadapi pemilu 2019 sudah sesuai karakter masyarakat kota Malang, menurut Nurjaman (dalam Nurjaman, 2018) masyarakat kota Malang merupakan masyarakat yang mempunyai karakteristik Islami yang tinggi, Masyarakat Malang merupakan masyarakat yang bercorak Islami, seperti menjadikan tokoh-tokoh Kyai atau Ulama-Ulama sebagai Patron dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus

menjadi panutan dalam hal spritual.

Langkah lain untuk memperkuat tentang ideologi partai, partai PPP dalam kepengurusannya di Kota Malang di isi oleh tokoh-tokoh agama seperti Kyai dan para ustad. Pasca pelaksanaan pemilu 2019 perolehan suara partai PPP di Kota Malang mengalami hasil yang buruk, partai PPP tidak mendapatkan kursi DPRD kota Malang. Permasalahan ini terjadi disebabkan karena adanya beberapa faktor permasalahan internal yang ada dalam partai PPP, seperti yang kita ketahui sebelum pelaksanaan pemilu ketua umum partai PPP tersandung kasus pelanggaran hukum, konflik internal sebuah partai akan berdampak terhambatnya partai dalam menjalankan fungsi dan kinerjanya (Budiatri, 2018).

Berdasarkan analisis data permasalahan di atas, partai PPP Kota Malang sudah melakukan langkah yang semestinya untuk meraup perolehan suara, tetapi di sisi lain partai PPP harus terkendala dengan permasalahan yang ada di internal partai

#### b. Partai PKS

Partai PKS dalam menghadapi pemilu 2019 yakni tidak mengangkat sosok figuritas dalam partai, serta tidak mengangkat isu-isu politik identitas. Partai PKS pada Pemilihan umum 2019 di Kota Malang berhasil mendapatkan 6 kursi DPRD meningkat 100% dari priode sebelumnya yang berjumlah 3 kursi, hasil ini mendekati target yang ditetapkan pusat sebanyak 8 kursi. Keberhasilan partai PKS mendapat suara rakyat tidak lepas dari usaha-usaha para kader yang sudah disebutkan di atas, artinya ada efektifitas yang cukup besar dalam langkah-langkah PKS menarik minat masyarakat, hal ini juga sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kordinasi internal sangat berpengaruh besar terhadap kinerja partai.

Pembinaan serta pengarahan yang dilakukan kepada kader partai di setiap daerah merupakan strategi yang tepat untuk memuluskan kinerja partai. Para kader yang tertidik bukan hanya mampu meraih suara rakyat, tapi juga mampu mengawal perolehan suara partai untuk terhindar dari segala kemungkinan buruk, termasuk kecurangan, kesalahan input dan permasalahan yang lain. Langkah partai PKS dengan tidak mengandalkan figuritas dan politik identitas juga merupakan langkah yang tepat dilakukan, karena pada dasarnya kepentingan khalayak umum merupakan hal yang paling penting di antara sosok figur partai dan politik identitas, penghapusan pajak kendaraan dan masa berlaku SIM seumur hidup merupakan isu yang di angkat partai PKS untuk kepentingan semua orang di luar kepentingan sosok figuritas dan golongan politik identitas tertentu. Pernyataan tersebut juga didukung dengan pendapat (Haboddin, 2012) mengatakan politik identitas memberikan garis tegas siapa yang diterima dan siapa yang ditolak, artinya ada batasan tertentu untuk setiap kepentingan.

Berdasarkan analisis fakta di atas, perolehan suara partai PKS dalam menghadapi pemilu 2019 kota Malang mendapat hasil yang cukup signifikan itu merupakan buah hasil ini merupakan buah dari usaha kordinasi internal yang cukup bagus untuk membuat setiap peran kader partai menjadi maksimal, serta menghilangkan ketergantungan terhadap figuritas dan identitas merupakan langkah yang juga cukup berpengaruh terhadap perolehan suara

#### c. Partai Amanat Nasional

Berdasarkan hasil wawancara sekaligus hasil observasi yang telah dilakukan, karakter partai PAN pada pemilu 2019 sedikit membawa nuansa politik identitas, Karakter partai PAN di atas sesuai dengan teori

Geetz yang sudah disebutkan pada BAB I tentang 3 pembagian golongan masyarakat Islam dalam hal politik, yakni umat Islam yang taat adalah mereka yang memilih partai yang berbasis Islam, teori tersebut mengasosiasikan golongan yang memilih partai berbasis Islam adalah golongan santri. Ulama yang merupakan figuritas dalam langkah politik partai PAN merupakan juga figuritas dari golongan Muslim, hal ini diharapkan mampu mendongkrak perolehan suara partai PAN. karakter lain dari partai PAN pada pemilu 2019 Kota Malang lebih sederhana dan lebih fokus pada kemenangan calon legislatif di daerah dari pada kemenangan Calon Presiden yang di usung koalisi, tetapi pada pelaksanaannya karakter tersebut tidak berjalan maksimal dalam perairan suara di kota Malang, hal ini bisa dilihat dari perolehan kursi DPRD kota Malang yang mengalami penurunan menjadi 3 kursi berkurang 1 kursi dari preode sebelumnya yang berjumlah 4 kursi, sedangkan untuk tingkat Nasional partai PAN berhasil meraih 7,1% suara sah Nasional, dari penjabaran di atas nuansa politik identitas yang sempat dibahas sebelumnya hanya mampu mendongkrak suara PAN di tingkat Nasional saja, tetapi kurang efektif di Kota Malang.

#### d. Partai PKB

Berdasarkan hasil temuan, partai PKB ingin menghadapi pemilu 2019 dengan merangkul semua golongan terutama anak muda yang ada di Kota Malang, di sisi lain partai PKB kota Malang juga memfokuskan terhadap kemenangan pasangan calon Presiden yang di usung koalisi 01, mengingat calon wakil presiden dari partai PKB. Berdasarkan fakta di atas karakter partai PKB dalam menghadapi pemilu 2019 di Kota Malang bukan hanya fokus untuk kemenangan caleg saja melainkan untuk kemenangan calon Presiden yang mereka usung, hal ini bisa dilihat dari hasil observasi yang telah dilakukan yakni di

setiap sosialisai atau kampanye caleg PKB di Kota Malang selalu di iringi dengan sosialisasi calon Presiden, sedangkan disisi lain adanya figuritas partai PKB yang juga merupakan sosok Figuritas dari organisasi Masyarakat Islam NU yang maju sebagai calon wakil Presiden, menjadi sebuah berkah tersendiri untuk partai PKB dalam meraup suara, hal ini bisa dilihat dari perolehan suara partai PKB di kota Malang yang berhasil meraih 7 kursi DPRD, hal ini juga sejalan dengan pendapat (Aziz, 2007) mengatakan bahwa adanya figuritas dalam politik mempengaruhi selera publik dalam menentukan pilihan, pemilih seperti ini tidak memiliki orientasi ideologi dan tak terlalu menganggap kebijakan partai penting, pemilih ini lebih mengutamakan kedekatan agama, sosial, dan budaya untuk menentukan pilihan.

Penelitian yang lain yang berjudul "Partai Islam dan pemilih Islam di Indonesia" yang dilakukan oleh Romli (2016) penelitian tersebut menjabarkan bahwa salah satu penyebab adanya politik identitas yang berbasis agama karena adanya faktor teologis, artinya agama dan politik tidak bisa dipisahkan, faktor lain yang disebutkan dalam penelitian Romli yakni adanya faktor Sosiologis, di Indonesia Islam merupakan Agama Mayoritas, maka wajar jika pergerakan politik sering kali disangkut pautkan dengan agama agar mendapat dukungan dari kelompok mayoritas yakni kelompok Islam. Berdasarkan penjabaran fakta di lapangan tentang karakter Partai maka dapat disimpulkan apa yang dilakukan partai Islam dalam meraih Suara pada pemilu 2019 merupakan cara yang sudah sewajarnya dilakukan.

#### **Pandangan Permasalahan fenomena disharmonisasi partai-partai Islam pada pemilu 2019 di kota Malang**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan berikut merupakan

tanggapan dari partai-partai Islam dalam menghadapi permasalahan Fenomena Disharmonisasi.

#### a. Partai PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan partai Islam yang sudah lama ada di perpolitikan Indonesia bearnggapan tidak adanya kordinasi yang bagus kubu internal partai merupakan salah satu penyebabnya. partai PPP beranggapan adanya permasalahan disharmonisasi disebabkan kurangnya kordinasi internal partai. Partai PPP juga menyebutkan salah satu faktor melemahnya kordinasi karena adanya orang partai yang mementingkan kepentingan posisi pribadinya dari pada ideologi partai.

Berdasarkan analisis fakta di atas, partai PPP sedang mengalami permasalahan internal yang berdampak terhadap sosialisasi partai, permasalahan ininternal ini disebabkan karena adanya orang partai yang hanya mementingkan posisi pribadi, permasalahan ini mengganggu terhadap kinerja partai PPP, bahkan akan berdampak terhadap perpecahan kubu partai. Pernyataan di atas sejalan dengan pendapat sebelumnya yang sudah dijelaskan dalam BAB III tentang permasalahan disharmonisasi yang disebabkan karena adanya bentuk perwajahan ganda dalam kepemimpinan tertinggi partai (Subekti, 2014).

Permasalahan yang di alami sisi internal partai PPP mempunyai dampak yang besar terhadap ke kinerja partai PPP, termasuk kinerja partai tingkat daerah, para kader merasa tidak sesuai dengan apa yang telah diarahkan oleh partai sehingga akan berpengaruh terhadap peran sosialisasi mereka di masyarakat, seperti yang di alami oleh Pimpinan Anak Cabang (PAC) kecamatan Blimbing Kota Malang yang memilih mendukung pasangan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 02, padahal partai PPP sudah

menyatakan diri bergabung dengan koalisi 01. Permasalahan-permasalahan di atas lah yang akan menimbulkan berbagai presepsi yang beragam dari partai Islam lain, salah satu presepsi bahwa PPP telah gagal menjaga komunikasi di internal partai.

#### b. Partai PKS

Partai PKS yang merupakan salah satu partai Islam yang berdiri pasca reformasi sering kali mengalami permasalahan yang serupa, dalam menanggapi permasalahan disharmonisasi yang terjadi pada pemilu 2019, partai PKS beranggapan bahwa hal tersebut merupakan suatu yang wajar di ranah politik, tetapi di luar kewajaran dalam ranah politik terapat beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya disharmonisasi, diantaranya adanya identitas golongan tertentu dalam kubu partai.

Dampak dari permasalahan yang disebutkan di atas akan menimbulkan presepsi yang berkotak-kotak di masyarakat, contohnya dalam kalangan Islam di Indonesia ada organisasi yang besar dan berpengaruh yakni organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang dalam hal politik condong terhadap partai PKB, hal ini akan memberikan anggapan dari mereka yang bukan bagian dari ormas NU bahwa PKB hanya berjalan sesuai kriteria ormas NU, hingga pada akhirnya golongan atau kelompok Islam lain akan mendirikan partai politik yang sesuai dengan kriteria kelompok mereka.

#### c. Partai PAN

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Partai PAN beranggapan Media punya andil yang besar dalam setiap permasalahan politik termasuk permasalahan disharmonisasi, partai PAN beranggapan informasi yang tidak kredibel atau bohong dari suatu media merupakan penyebab utama timbulnya permasalahan disharmonisasi, Informasi yang salah (*Hoax*) bisa saja dilakukan oleh semua orang

yang mempunyai kepentingan termasuk kepentingan yang berbau politik. Menurut pendapat (Juliswara, 2017) mengatakan, Informasi yang beredar secara liar di media sosial sering sekali di manfaatkan oleh orang yang tak bertanggung jawab untuk menyerang pribadi orang lain demi kepentingan politik atau kelompok.

Berdasarkan pernyataan di atas partai PAN beranggapan tentang permasalahan disharmonisasi terjadi pada pemilu 2019 di Kota Malang karena adanya peran Media, entah itu peran Media di Sekala Nasional atau di Kota Malang. Permasalahan tentang Media yang menyebarkan informasi bohong juga sempat melanda partai PAN pada pasca pemilu 2019, yakni ketika partai PAN diisukan keluar dari koalisi 02, selain menyebabkan kerugian terhadap partai PAN, tentunya informasi tersebut juga berpotensi menjadi konflik, baik konflik secara internal di partai PAN atau konflik dengan partai koalisi yang lain.

#### d. Partai PKB

Partai PKB beranggapan penyebab Pemasalahan disharmonisasi yang terjadi pada pemilu 2019 di kota Malang tak terlepas dari kepentingan setiap individual partai yang ingin memperjuangkan kepentingan pribadi. Berdasarkan analisis data di atas faktor yang menyebabkan disharmonisasi yang terjadi pada pemilu 2019 di kota Malang antar partai Islam adalah tentang perebutan kekuasaan, hal ini sejalan dengan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya pada peta konseptual penelitian yang ada pada BAB III, menurut (Romli, 2016) disharmonisasi terjadi karena adanya faktor ingin meraih kekuasaan.

Pada pemilu 2019 partai PKB berhasil mengirim kadernya untuk menjadi calon wakil Presiden, selain itu yang menjadi sorotan lain dari partai PKB adanya isu permintaan jatah 10 menteri dari partai PKB jika pasangan calon presiden 01 terpilih, walaupun dalam hal ini ketua umum partai

PKB tidak menyampaikan secara formal tetapi setidaknya isu ini berhasil menarik perhatian publik termasuk elite politik setiap koalisi, pernyataan tersebut juga rawan terhadap konflik karena adanya kecemburuan sosial di kalangan partai lain. Meminta jatah menteri merupakan hal yang sangat wajar dan itu merupakan hak dari partai pengusung, tetapi jika kita melihat dari posisi partai PKB yang sudah menempatkan kadernya di posisi tertinggi kedua dalam politik yaitu sebagai wakil Presiden kemudian menginginkan 10 kursi menteri, tentunya hal ini sedikit kurang wajar karena seperti kita ketahui ada 2 lagi partai Islam yang berada dikubu koalisi partai PKB yakni partai PPP dan PBB, tentunya mereka juga ingin mendapat jatah kursi menteri.

Berdasarkan penjabaran fakta dan analisis di atas, tiga dari empat partai yang dijadikan subjek dalam penelitian ini mengatakan faktor disharmonisasi datang dari segi Internal, seperti hilangnya Ideologis partai, patron partai bergerak untuk memperjuangkan pribadi dan adanya ormas tertentu dalam kubu partai, sedangkan faktor yang lain adalah adanya media. Peran media dalam terjadinya Disharmonisasi pernah dibahas dalam penelitian yang berjudul “peta kekuatan politik pada pemilihan kepala daerah tanah toraja 2010” yang dilakukan oleh Ishak (2018) dalam penelitian tersebut disebutkan sisi lain dari dampak adanya pemberitaan dari media mampu menyebabkan adanya disharmonisasi dalam kehidupan masyarakat bahkan sampai terjadinya huru-hara. Berdasarkan analisis fakta dalam penelitian ini maka, apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian sebelumnya sesuai dengan yang terjadi dilapangan.

#### **Solusi permasalahan disharmonisasi**

Permasalahan disharmonisasi merupakan suatu permasalahan klasik di ranah perpolitikan, tetapi permasalahan ini jika dibiarkan

dikhawatirkan merambat ke permasalahan yang lebih besar, termasuk permasalahan yang mengancam Konstitusi Negara atau Ideologis suatu Agama, dalam menghadapi permasalahan disharmonisasi partai-partai Islam pada pemilu 2019 di kota Malang setiap partai Islam memiliki beberapa pendapat, baik pendapat yang masih sekedar wacana sampai suatu pendapat yang sudah diterapkan.

#### a. Partai PPP

Berdasarkan hasil wawancara di dan observasi yang telah dilakukan partai PPP lebih fokus ke permasalahan internal terlebih dahulu, terlepas dari permasalahan tersebut partai PPP berharap setiap partai Islam mampu menjaga hubungan dengan di mulai dari kepengurusan paling bawah.

Berdasarkan pernyataan di atas partai PPP kota Malang akan lebih fokus terhadap permasalahan-permasalahan internal partai, hal ini sejalan dengan teori pembahasan yang ada dalam peta konseptual pada Bab III sebelumnya, menurut (Romli, 2016) dalam menghadapi permasalahan disharmonisasi antar partai, kader partai harus mampu mengatasi permasalahan internal. Salah satu langkah partai PPP dalam mengatasi permasalahan disharmonisasi yaitu melakukan silaturahmi dengan kader partai lain yang dimulai dari tingkat bawah, hal ini sudah dilakukan sejak beberapatahun sebelumnya dan mengenai hasil, langkah ini cukup efektif untuk meredakan suatu persaingan politik yang memanas. Pernyataan di atas didukung dengan pendapat (Taher, 2009) yang mengatakan dialog dengan kelompok lain mampu menciptakan kondisi hubungan yang lebih jujur, terbuka dan lebih kritis terhadap diri sendiri maupun pihak lain.

#### b. Partai PKS

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan, Partai PKS berharap adanya kesadaran di setiap

partai Islam bahwa kepentingan politik merupakan bukan hal yang pertama untuk diperjuangkan, sedangkan untuk langkah nyata, Partai PKS Juga mengatakan partai PKS berharap adanya peran para pemuda setiap partai yang aktif menjaga hubungan silaturrrahmi, terpilihnya kaum muda partai PKS dalam memperbaiki permasalahan disharmonisasi merupakan suatu hal yang tepat, dengan memilih kaum pemuda yang ada dalam partai, partai PKS berarti peka terhadap perkembangan zaman, sejatinya para kaum pemuda lebih aktif terhadap keadaan zaman yang milineal seperti sekarang, disisi lain para pemuda tidak memiliki terlalu banyak beban, termasuk beban diluar hal politik yaitu Keluarga, hal ini mampu memfokuskan kinerja pemuda di suatu partai Politik. Pernyataan di atas didukung dengan pendapat (Naafs & White, 2012) yang mengatakan bahwa pemuda adalah sebagai transisi, identitas, dan aksi dari sebuah budaya sosial, pemuda diharapkan mampu meperluas pengalamannya sebagai bagian dari suatu kelompok, hal ini sebagai bentuk penguatan posisi dan kaum para pemuda dalam kehidupannya sebagai aset bangsa.

#### c. Partai PAN

Berdasarkan temuan apa yang dilakukan partai PAN merupakan suatu hal yang sangat paenting untuk mengatasi permasalahan disharmonisasi, selain mengandalkan perankader partai, partai PAN sejatinya sudah paham tentang keberadaan media yang sebanyak saat ini, pemahaman partai PAN terhadap “cara main” media merupakan suatu hal yang tepat untuk sesi external partai, sedangkan untuk sesi internal adanya peran kader partai merupakan suatu perpaduan yang bagus dalam mengatasi permasalahan disharmonisasi, di sisi lain dengan membentuk komunitas kader partai-partai Islam yang berbasis online merupakan suatu bukti bahwa partai PAN dalam

langkah politiknya sudah peka terhadap perkembangan zaman, adanya media online sebagai basis komunitas para kader partai Islam membuat setiap partai lebih mudah menkonfirmasi setiap informasi yang memicu terjadinya permasalahan.

#### d. Partai PKB

Partai PKB sebagai salah satu partai Islam yang cukup lama di kancah perpolitikan Indonesia tentunya sudah paham terhadap berbagai permasalahan politik, maka dari hal itu partai PKB mempunyai beberapa usaha untuk mengatasi hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi partai PKB tidak terlalu “ambil pusing” terhadap permasalahan yang terjadi sekarang, karena menurut PKB apa yang terjadi merupakan suatu hal yang wajar dalam hal politik, walaupun terbilang berbeda dengan partai-partai Islam lain dalam menghadapi permasalahan disharmonisasi, langkah partai PKB untuk membiarkan permasalahan ini bukan merupakan suatu hal yang salah, pernyataan di atas didukung dengan pendapat Firmanzah (2008) mengatakan konflik yang terjadi dalam persaingan politik memang suatu hal yang wajar terjadi.

Berdasarkan penjabaran fakta dan data di atas, salah satu bentuk solusi untuk permasalahan disharmonisasi adalah adanya kesadaran diri dari setiap patron partai, untuk menumbuhkan hal itu setidaknya ada evaluasi dan sejenis pendidikan untuk segenap kader dan pengurus partai. Solusi permasalahan disharmonisasi yang telah disebutkan di atas juga sempat di bahas dalam penelitian yang dilakukan oleh Adhani (2014) dengan judul “Konsep Pendidikan Multikultural sebagai sarana Alternatif Pencegahan Konflik” dalam penelitian tersebut ada berbagai cara untuk mencegah konflik yang disebabkan disharmonisasi, salah

satunya ada pendidikan untuk menguatkan kesadaran diri, pendidikan tersebut bisa dilakukan dengan cara pembinaan, baik secara kelompok dan ataupun individu. Berdasarkan penjabaran di atas maka, langkah yang sudah dilakukan oleh partai Islam di kota Malang yang menjadi pembahasandalampenelitianini merupakan suatu langkah yang sudah benar, walaupun sepenuhnya belum maksimal tetapi ada nilai efektivitas yang cukup tinggi dalam penerarapan cara tersebut.

#### SIMPULAN

Politik identitas yang menjadi karakter PPP dalam menghadapi pemilu 2019 di Kota Malang harus gagal karena terganjal dengan permasalahan internal, sedangkan partai PKB yang juga menerapkan karakter serupa mendapatkan hasil yang cukup memusakan, politik identitas, sosok figuritas yang berpengaruh dan kordinasai internal yang bagus merupakan suatu kombinasi yang apik yang dilakukan partai PKB.

Berbeda dengan karakter-karakter di atas partai PKS dalam menghadapi pemilu 2019 di kota Malang mencoba lepas dari bayang-bayang politik identitas yang kerap ditujukan terhadap partai PKS, langkah partai PKS yang mengedepankan kepentingan masyarakat luas dari identitas tertentu berhasil meraih minat rakyat, janji masa SIM seumur hidup dan penghapusan pajak kendaraan merupakan bukti bahwa PKS berjuang untuk kepentingan umum. Terlepas dari usaha-usaha di atas, keadaan internal PKS yang mampu di kordinir secara solid merupakan faktor lain yang mendukung keberhasilan partai PKS kota Malang dalam meraih suara takyat. Karakter partai Islam lain pada pemilu 2019 di kota Malang yakni Partai PAN, dengan hasil yang sedikit menurun dari periode sebelumnya, bukan berarti partai PAN telah gagal meraih minat rakyat, hal ini bisa dilihat dari penurunan perolehan

suara yang tidak terlalu signifikan. Langkah partai PAN kota Malang dengan hanya fokus terhadap kemenangan caleg merupakan keputusan yang sedikit kurang tepat, salah satu alasannya adalah kurangnya nilai-nilai figuritas dari setiap caleg, bisa diartikan partai PAN tak punya nilai jual yang cukup menarik pada pemilu 2019 layaknya partai PKS dan partai PKB dengan nilai figuritas yang tinggi.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa karakter dari suatu partai tidak akan bekerja efektif dengan keadaan internal yang kurang bagus. Fakta lain, jika di lihat dari keberhasilan partai PKS di kota Malang dalam meraup suara maka dapat disimpulkan bahwa karakter masyarakat kota Malang kurang cocok dengan karakter politik identitas.

Permasalahan kedua yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yakni tentang fenomena disharmonisasi partai Islam pada pemilu 2019 di kota Malang faktor utama penyebab permasalahan tersebut karena adanya perbedaan pandangan atau ideologi yang beragam di setiap partai Islam, masing-masing partai Islam memiliki ideologi Islam yang dalam penerapan memiliki perbedaan. Adanya peran media juga mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya disharmonisasi. Sebagai partai yang sama-sama berbasis Islam, setiap kader partai harus sigap dan tanggap dalam menghadapi permasalahan yang sedang terjadi, adanya silaturahmi yang di mulai dari tingkat bawah akan membantu mempererat hubungan antar partai Islam, serta adanya kesadaran diri dari setiap pengurus partai akan mencegah individual partai bergerak di luar ideologis partai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhani. (2014). Konsep pendidikan multikultural sebagai sarana alternatif pencegh konflik. *Jurnal Sosio didaktika*, 1, 118–119.
- Afiyanti, Y. (2012). Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2), 137–141.
- Aziz, N, L, L. (2007) peran marketing dalam dunia politik. *Jurnal politik*, 1 (4). 127-129
- Bachtir, R. (2014). Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi. *Jurnal Politik Profetik*, 3(1). <https://doi.org/10.24252/jpp.v2i1.817>
- Budiatri, A, P. (2018). *Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Firmanzah. (2008). *Marketing Politik antara pemahaman dan realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya politik identitas diranah lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1)120-121.
- Ishak. (2018). Peta kekuatan politik pada pemilihan kepala daerah tana toraja tahun 2010. *Skripsi*. ilmu politik dan ilmu politik pemerintahan. Universitas Hasanuddin Makasar
- Hakim, L. N. (2013). Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 4(2), 165–172. Retrieved from <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/501>
- Hasbiansyah, O. (2008) pendekatan fenomenologi: pengantar praktik penelitian dalam ilmu sosial dan komunikasi. *Jurnal Mediator*, 9(1). 164-167.
- Masruri, A., Kuntoro, S. A., & Arikunto, S. (2016). Pengembangan Kompetensi Dan Pendidikan Berkelanjutan Pustakawan Ptain: Studi Kasus Di Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Jurnal Pengembangan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 4(1), 1–14. Retrieved from <https://>

- journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/9818/8637
- Juliswara, V. (2017) mengembangkan model literasi media yang berkebhinekaan dalam menganalisis berita palsu (Hoax) di media sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologis*. 4(2) 145-146.
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 127–138. [https://doi.org/DOI\\_10.1016/j.chemphys.2012.06.006](https://doi.org/DOI_10.1016/j.chemphys.2012.06.006).
- Naafs & Whit. (2012). Generasi antara: Refleksi tentang studi pemuda Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 1(2), 89-106.
- Nasaruddin & Bahtiar. (2018). Pemilihan daerah dan disharmonisasi Keluarga: Studi Kasus pada pilkada kabupaten muna barat 2017. *Jurnal neo Societal Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 3(1), 254–255.
- Nurjaman, Asep. (2018) *Sistem kepartaian Indonesia*. Malang:UMMPress
- Prasetya. (2011). Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *Journal Equilibrium*. Retrieved from [yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf](http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf)
- Ridwan. (2017). Hubungan Islam Dan Politik Di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna. *Jurnal Hukum*, 12, 223–236.
- Romli, L. (2016). Masalah Kelen bagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Politika*, 2(1), 21–30.
- Romli, L. (2016). Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 2(1), 29–48.
- Sarbaini. (2015). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, VIII(1642).
- Sari, E. (2016). Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 145–156.
- Subekti, Valina, Singka. (2014). *Partai Syariat Islam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sulaeman, A. (2015). Demokrasi, partai politik, dan pemilihan kepala daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 12–24
- Taher, Peldi, E. (2009). *Merayakan Kebebasan Beragama*. Jakarta: ICRP